

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

### Buku

Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Al-Jazari, A. R. (2007). *Fiqih Empat Mazhab*. Jakarta: Rajawali Press.

- Anshari, H. (1983). *Pengaturan Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Arfan, A. (2012). *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*. Malang: Fakultas Syariah UIN.
- Arto, A. M. (2008). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, A. A. M. (2010). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni Bandung.
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Bekker, A. (1986). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Chomzah, A. A. (2004). *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Jilid II*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Dirdjosisworo, S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Efendi, B. (1993). *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni Bandung.
- Fyzee, A. A. A. (1961). *Pokok-Pokok Hukum Islam II*. Jakarta: Tintamas.
- Harahap, M. Y. (1997). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C. S. T. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bag. Pertama*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Naim, N. (2012). *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nugroho, E. K. (2021). *Pembatalan Perjanjian Melalui Pengajuan Permohonan ke Pengadilan*. Yogyakarta: FH UI Press.
- Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Pasaribu, K. (2004). *Masalah-Masalah Hak Atas Tanah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- PPHIMM. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Rasyid, R. A. (2010). *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Cet. 14. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saebani, B. A dan Syamsul Falah. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso, U. (2008). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Santoso, J. dan Achmad Ali. (1983). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: UII.
- Sholihuddin, M. (2014). *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*. Surabaya: UIN SA Press.
- Sidik, S. H. (2006). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekamto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. (2003). *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. PT. Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.

- Subketi, R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suninda, Y. W. dan Ninik Widiyanti. (1988). *Pembaharuan Hukum Agraria*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sutendi, A. (2010). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutopo, U., Safira, M. E. dan Khasanah, N. U. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sumardjo, M. (1997). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Sumardjo, M. (2001). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Waskito dan Arnowo, H.. (2017). *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*. Jakarta Kencana.
- Waskito dan Arnowo, H. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zuhriah, E. (2014). *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press.

### **Jurnal, Artikel**

- Abdullah, M., Alting, H., & Alauddin, R. (2023). Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah oleh Pengadilan Agama. *Amanna Gappa*, 12-19.
- Arifin, S. (2023). Penyalahgunaan Paksaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(1), 1174-1178.
- Aula, I. M., & Cahyono, A. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law). *Lex Patrimonium*, 2(2), 11.
- Azikin, W. (2018). Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam. *Meraja journal*, 1(3).

- Bafadhal, F. (2013). Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43291.
- Bashori, D. C., & Ichsan, M. (2021). Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1).
- Budify, A., Manurung, J. A. L., & Hariandja, S. B. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 72-85.
- Choiriyah, S. (2023). Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam Perspektif Siyasah Idariyyah. Skripsi. Sekolah Sarjana. Riau: UIN Suska.
- Djusfi, A. R., & Winata, J. (2019). Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2).
- Dzulfiqar. (2018). Pengaruh Peraturan Pesantren Terhadap Kedisiplinan Santri Pada Pondok Pesantren Jabal Nur Jadid Desa Meurandeh Kabupaten Aceh Barat Daya. Skripsi. Sekolah Sarjana. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Fahlepy, R., Delfiana, A. M., Rahmadani, D. D., & Novitasari, S. D. (2021). Status Peralihan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Hibah Di Bawah Tangan. *Jurnal de jure*, 13(1).
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Gania, N. (2019). Pembatalan Akta Hibah Atas Tanah Bersama Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg. Skripsi. Sekolah Sarjana. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ghani, A. A. A., Said, N. L. M., Muda, M. Z., & Azani, S. F. (2023). Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Journal of Contemporary Islamic Law*, 8(2), 27-34.
- Hidayat, R. (2021). Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam. *Law & Justice Review Journal*, 1(1), 1-6.
- Ibrahim, Z. S. (2021). Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 5(2), 132-146.

- Lisdaleni, L., & Muyasaroh, M. (2023). Pranata Hukum Hibah. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 192-206.
- Lukitasari, A. I. (2016). Itikad Tidak Baik Terkait Pihak Yang Menyebabkan Kerugian Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Skripsi. Sekolah Sarjana. Malang: Universitas Brawijaya.
- Martono, E. (2015). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Yustisia Merdeka*, 1(2).
- Muhtarom, M. (2014). Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak.
- Nachrawi, S., & Jumadil, J. (2024). Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 136-152.
- Oping, M. S. R. (2017). Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 5(7).
- Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356-363.
- Politon, R. (2017). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan para pihak dalam kontrak Ditinjau dari kitab undang undang Hukum perdata. *Lex Crimen*, 6(3).
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.
- Rangkuti, A. B. (2014). Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya terhadap Sertipikat Hasil Peralihan Hak. *Premise Law Journal*, 5, 14048.
- Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99-113.
- Silado, A. B., & Syailendra, M. R. (2023). Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. *UNES Law Review*, 6(2), 5647-5658.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

- Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Suriawan, K., & Mariadi, N. N. (2017). Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Bentuk Akta Hibah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng). *Kertha Widya*, 5(2).
- Suwahyuwono, S. (2018). Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Uupa. *Lex Privatum*, 6(3).
- Tejawati, D. N. (2021). Penguasaan Hak Atas Tanah Bagi Badan Hukum Asing Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 39-47.
- Tendean, C. (2016). Peralihan Hak Milik Atas Tanah Akibat Hibah Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria. *Lex Privatum*, 4(7).
- Turagan, A. F. (2019). pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik menurut pasal 1338 KUHPperdata. *Lex Privatum*, 7(1).
- Ulya, Z. (2017). Hibah perspektif fikih, KHI dan KHES. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(2), 1-23.
- Wahyuni, E. S. (2009). Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt. G/2004/Pnsmg) (*Doctoral dissertation*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

### **Website**

- Tausikal, M. A. (2024, 9 Januari). Syarat dan Ketentuan Hibah, Termasuk Hibah untuk Anak. <https://rumaysho.com/37944-matan-taqrib-rukun-syarat-dan-ketentuan-hibah-termasuk-hibah-untuk-anak.html>